

Implementasi Sistem Pembayaran Non Tunai di Kota Betun Kabupaten Malaka

Anastasia Bernaria Klau¹, Fransina W. Ballo², Novi Theresia Kiak³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat: Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: anastasiaklau049@gmail.com

Abstract This research discusses the implementation of a non-cash payment system in Betun City, Malacca Regency. This study aims to find out how to implement the non-cash payment system, as well as to find out the supporting and inhibiting factors in the implementation of non-cash payments. This study uses a qualitative research approach with a qualitative descriptive research type. The data sources used in this study are primary data and secondary data. The data collection techniques in this study are observation, interviews and documentation. The results of this study show that the implementation of the non-cash payment system in Betun City, Malacca Regency has not been fully implemented by the people of Betun City, Malacca Regency using non-cash payments. Supporting factors in the implementation of the non-cash payment system in Betun City, Malacca Regency, are the cooperation between banks and the government and socialization to the community. The factors inhibiting the implementation of non-cash payments in the city of Betun, Malacca Regency are still low human resources and unstable internet networks.

Keywords: Implementation, Non-Cash Transactions, Betun City.

Abstrak Penelitian ini membahas tentang implementasi sistem pembayaran non tunai di Kota Betun Kabupaten Malaka. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana implementasi sistem pembayaran non tunai, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pembayaran non tunai. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem pembayaran non tunai di Kota Betun Kabupaten Malaka belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat Kota Betun Kabupaten Malaka dengan menggunakan pembayaran non tunai. Faktor pendukung dalam penerapan sistem pembayaran non tunai di Kota Betun Kabupaten Malaka yaitu, adanya kerjasama antara bank dan pemerintah dan adanya sosialisasi kepada masyarakat. Faktor penghambat penerapan pembayaran non tunai di Kota Betun Kabupaten Malaka adalah sumber daya manusia yang masih rendah dan jaringan internet yang tidak stabil.

Kata Kunci: Implementasi, Transaksi Non Tunai, Kota Betun.

1. LATAR BELAKANG

Instrumen dan sistem pembayaran yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi perekonomian mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan peradaban masyarakat dan teknologi informasi. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peran uang tunai dalam bentuk metode pembayaran tanpa uang tunai yang lebih efisien dan ekonomis. Pembayaran non tunai biasanya tidak dilakukan melalui metode pembayaran tetapi transfer bank atau transfer antar bank melalui internal bank sendiri. Ini juga dapat digunakan sebagai bentuk pembayaran non tunai, tanpa uang tunai, misalnya menggunakan kartu ATM, kartu debit dan kartu kredit (Pramono, 2006).

Alat pembayaran non tunai saat ini sudah berkembang dan semakin lazim dipakai masyarakat. Saat ini cukup banyak variasi instrumen pembayaran non tunai, beberapa contoh yang cukup banyak digunakan antara lain, kartu ATM/debet, kartu kredit, dan uang elektronik (*e-money*). Berikut data pengguna alat transaksi non tunai di NTT:

Tabel 1.1
Jumlah Pengguna Alat Transaksi Non Tunai Di NTT

Tahun	Kartu Debet	Kartu Kredit	Uang Elektronik
2019	1,93 juta unit	0,03	1.800 unit
2020	2,28 juta unit	0,05	2.853 unit
2021	3,18 juta unit	0,03	2.250 unit
2022	4,16 juta unit	0,03	2.739 unit
2023	4,54 juta unit	0,04	2.247 unit

Sumber: Bank Indonesia, 2023

Berdasarkan data Bank Indonesia pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah pengguna alat transaksi non tunai kartu ATM debit lebih banyak dan mengalami peningkatan setiap tahunnya dibandingkan alat transaksi lainnya. Menurut Gubernur Bank Indonesia, pertumbuhan nilai transaksi uang elektronik atau non tunai yang melonjak tajam karena dipengaruhi oleh kinerja positif uang elektronik dan preferensi masyarakat dalam bertransaksi dengan menggunakan *financial technology (fintech)* serta *e-commerce*. Perkembangan teknologi membawa perubahan terhadap kebutuhan masyarakat akan alat pembayaran yang dapat memenuhi kecepatan, ketepatan dan keamanan dalam setiap transaksi (Abidin, 2015).

Transaksi non tunai merupakan perwujudan dari sistem Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang dilayani perbankan, dunia perbankan secara tidak langsung menciptakan inovasi teknologi baru dalam sistem pembayaran. Saat ini perbankan pun terus memberikan fasilitas untuk memudahkan dalam menggunakan transaksi non tunai. Transaksi non tunai bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti ATM, *M-Banking*, *E-Banking*, Kartu Debit atau Kartu Kredit (Harahap 2018:2).

Implementasi sistem pembayaran non tunai yang digunakan untuk pembayaran secara *online* yaitu transaksi yang dilakukan secara digital melalui *platform e-commerce* atau aplikasi mobile atau *offline* yaitu transaksi yang dilakukan secara langsung di tempat seperti toko, kios atau outlet, namun baik *online* maupun *offline* keduanya sama-sama membutuhkan internet untuk dapat melakukan transaksi. Banyak metode pembayaran non tunai yang memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi. Dengan menggunakan transaksi non tunai, memudahkan pengguna untuk tidak kesulitan dalam mencari uang

kembalian dan pengguna tidak perlu membawa banyak uang kartal ketika berbelanja (Sihalolo, 2020). Untuk mengembangkan transaksi non tunai pemerintah berusaha membuat rencana dan berbagai kebijakan yang mendukung kemajuan transaksi non tunai.

Kota Betun merupakan ibukota dan pusat Kota dari Kabupaten Malaka. Kabupaten Malaka merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Belu yang dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan pusat pemerintahan berada di Betun. Sebagai pusat Kota di Kabupaten Malaka, Kota Betun memiliki sejumlah pusat perbelanjaan maupun perdagangan, yang telah menerapkan transaksi non tunai pada kegiatan ekonominya. Pemerintah Kabupaten Malaka sendiri sudah menerapkan transaksi non tunai yang tercantum dalam Peraturan Bupati Malaka Nomor 28 Tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Pembayaran Non Tunai Pada Pemerintahan Kabupaten Malaka. Kabupaten Malaka saat ini mulai menerapkan digitalisasi pada masyarakat, terutama di Kota Betun yang cenderung sudah melek digital. Dilihat dari jumlah pelaku usaha, pusat perbelanjaan maupun perdagangan, Kota Betun cukup banyak bila dibandingkan daerah-daerah lain di Kabupaten Malaka. Berawal dari ini peneliti ingin mengetahui implementasi sistem pembayaran non tunai di Kota Betun dan faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan sistem pembayaran non tunai di Kota Betun.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif (Darmalaksana, 2020), yaitu dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan situasi dan kondisi, pendapat-pendapat yang berkembang, fenomena dan masalah yang terjadi Sugiyono (2018). Penelitian ini berupaya memperoleh gambaran tentang implementasi sistem pembayaran non tunai dan apa kendala dan upaya dalam mengimplementasi pembayaran non tunai.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah menggunakan teknik pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, Penelitian akan mengumpulkan data secara langsung dari sumber utamanya yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian mengenai implementasi sistem pembayaran non tunai, untuk melengkapi kebutuhan data penelitian berupa diagram, grafik, atau tabel. bisa diperoleh melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah setelah itu dianalisis menggunakan teknik analisis dekriptif kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan, mengelola menyajikan dan menjabarkan hasil penelitian sebagaimana adanya, dengan

analisis data Reduksi Data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk mengetahui jawaban yang diteliti (Wicaksono, 2020).

3. HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Sistem Pembayaran Non Tunai Di Kota Betun Kabupaten Malaka

Implementasi sistem pembayaran non tunai adalah penerapan penggunaan alat transaksi non tunai dengan menggunakan instrumen keuangan seperti kartu kredit, kartu debit, nota, Qris maupun BRImo. Penerapan sistem ini dapat membuat transaksi menjadi lebih cepat dan praktis dan pengguna tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak. Selain itu, sistem ini juga dapat membantu efisien biaya produksi uang kartal, pengedaran, pencabutan, penarikan, dan pemusnahan uang.

1. Implementasi Sistem Pembayaran Non Tunai

Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem pembayaran non tunai adalah penggunaan alat pembayaran yang tidak lagi memerlukan uang fisik. Sistem pembayaran non tunai dapat diimplementasikan melalui berbagai instrumen dan metode pembayaran seperti, Kartu Kredit, Kartu Debit, Cek, Uang Elektronik, Transfer Bank, Nota Debit dan Dompot Digital.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala sub bagian Ekonomi Kabupaten Malaka terkait implementasi sistem pembayaran non tunai di Kota Betun Kabupaten Malaka sejauh ini ada pelaksanaan atau penerapan dari pemerintah kepada masyarakat mungkin belum ada tetapi ada sosialisasi mengenai baiknya menggunakan transaksi non tunai. Tetapi untuk alat transaksi non tunai seperti ATM atau lainnya, sedikit banyak masyarakat sudah menggunakan. Termasuk yang dipemerintahan pun, untuk gaji pegawai sudah menggunakan non tunai dalam artian ditransfer langsung ke rekening masing-masing pegawai. Sehingga diharapkan kedepannya mungkin pemerintah bisa menerapkan transaksi non tunai secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai tujuan diterapkannya sistem pembayaran non tunai khususnya Kota Betun, menyatakan bahwa Dengan adanya penerapan digitalisasi ini diharapkan dapat meminimalisir penyimpang-penyimpangan yang tidak diinginkan dan mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran sistem digital. Berdasarkan hasil wawancara manfaat penerapan pembayaran non tunai ini bagi masyarakat, menyatakan bermanfaat,

karena sebagai masyarakat tidak perlu membawa uang dalam jumlah banyak, jadi terhindar dari pencurian atau perampokan.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai implementasi pembayaran non tunai yang ada di Kota Betun Kabupaten Malaka menyatakan sudah ada penerapan pembayaran non tunai yaitu bayar pakai kartu ATM, tetapi belum ada surat edaran resmi dari pemerintah untuk menggunakan non tunai yang lain, jadi kami sebagai masyarakat hanya mengetahui melalui berita-berita yang beredar. Kalau pembayaran atau transaksi non tunai kartu ATM untuk belanja kebutuhan sehari-hari, sebagai masyarakat sudah menggunakannya.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Sistem Pembayaran Non Tunai di Kota Betun Kabupaten Malaka

a. Faktor Pendukung

1. Kerja Sama dengan pihak Bank

Kerja sama dengan pihak bank merupakan salah satu faktor yang mendukung implementasi pembayaran non tunai. Berdasarkan hasil wawancara terkait faktor pendukung implementasi pembayaran non tunai, menyatakan Faktor yang mendukung salah satunya bekerja sama dengan pihak bank dalam rangka menerapkan digitalisasi kepada masyarakat setempat. Selain itu didalam pemerintahan untuk gaji pegawai juga sudah non tunai, jadi gaji para pegawai menggunakan sistem tranfer langsung ke rekening masing-masing pegawai. Jadi diharapkan kedepannya pemerintah bekerja sama dengan bank untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembayaran non tunai ini.

2. Sosialisasi dari pemerintah maupun bank kepada masyarakat

Sosialisasi merupakan salah satu faktor yang mendukung dalam implementasi pembayaran non tunai, dengan adanya sosialisasi masyarakat bisa mengenal dan mengetahui penggunaan pembayaran non tunai. Berdasarkan hasil wawancara Dengan dilakukannya sosialisasi dari pemerintah maupun bank, diharapkan masyarakat bisa melek digital dan mau menerapkan dan menggunakan dalam kehidupan sehari-hari mereka dan ini juga diharapkan dapat membantu memudahkan proses transaksi mereka.

b. Faktor Penghambat

1. Keterbatasan Masyarakat Dalam Menggunakan *Smartphone*

Keterbatasan masyarakat dalam menggunakan *smartphone* merupakan faktor penghambat dalam proses pelaksanaan dan pencapaian tujuan dari pemerintah setempat. Tidak semua masyarakat, terutama orang yang lebih tua atau mereka yang kurang terpapar teknologi, memiliki *smartphone* yang mumpuni untuk melakukan transaksi *online*. Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa faktor penghambat salah satunya sumber daya masyarakat yang masih rendah pemahaman tentang pembayaran non tunai. Hal ini yang menjadi hambatan karena sedikit banyak yang belum mengerti bagaimana cara menggunakannya atau bahkan ada yang belum punya *smartphone*. Tapi semua bisa diatasi melalui sosialisasi langsung ke masyarakat.

Ketidakmerataan ini menyebabkan sebagian masyarakat masih bergantung pada uang tunai. Selain itu banyak pelaku UMKM dan masyarakat yang sudah memiliki *smartphone* namun belum familiar dengan cara kerja sistem pembayaran non tunai khususnya digital. Berdasarkan wawancara, menyatakan Minimnya pemahaman masyarakat menjadi kendala dalam implementasi pembayaran non tunai. Hal ini karena kurangnya literasi, kurangnya sosialisasi dari pihak bank maupun pemerintah dan kurangnya kepercayaan masyarakat.

2. Jaringan internet yang tidak stabil

Jaringan internet yang tidak stabil dapat menjadi kendala dalam penerapan pembayaran non tunai. Hal ini karena transaksi non tunai memerlukan koneksi internet yang handal. Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa Jaringan jadi salah satu kendala juga dalam penerapan transaksi non tunai, proses pembayaran non tunai membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan transaksi tunai karena kendala jaringan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan masyarakat mempunyai harapan agar pemerintah dapat menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik beserta program-program yang ada tetap menyentuh masyarakat dan dapat mensejahterakan masyarakat.

4. PEMBAHASAN

A. Implementasi Sistem Pembayaran Non Tunai

Implementasi sistem pembayaran non tunai menjadi salah satu alternatif untuk mendorong masyarakat dalam menggunakan transaksi non tunai dilihat dari keamanan, kemudahan dan efisien. Berdasarkan hasil wawancara mengenai implementasi sistem pembayaran non tunai di Kota Betun Kabupaten Malaka dalam mengimplementasikan pembayaran non tunai bukan hanya di pemerintahan tetapi juga di masyarakat. Dalam pemerintahan diterapkan berupa gaji pegawai yang di transfer ke masing-masing rekening pegawai dan juga belanja kebutuhan sarana dan prasarana kantor. Sedangkan di masyarakat diterapkan berupa program bantuan sosial yang di transfer atau dikirim ke rekening penerima bantuan sosial, pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) melalui aplikasi *online*.

Untuk masyarakat pada umumnya banyak yang masih menggunakan uang tunai dan kartu ATM sebagai alat transaksi untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan untuk mobile banking seperti QRIS atau aplikasi bayar pajak *online* sebagian besar masyarakat belum menggunakan karena keterbatasan pengguna *handphone/smartphone* yang mumpuni. Bisa dikatakan Implementasi sistem pembayaran non tunai di Kabupaten Malaka Kota Betun saat ini berjalan belum cukup baik, dilihat dari partisipasi masyarakat dalam menggunakan pembayaran non tunai terhadap program-program yang sudah menggunakan sistem pembayaran non tunai salah satunya pembayaran pajak melalui aplikasi *online* yang dimana masih banyak yang belum menggunakannya dikarenakan keterbatasan pengguna *smartphone*. Oleh karena itu, diharapkan kedepannya dilakukan penerapan dan edukasi lebih banyak kepada masyarakat yang menggunakan pembayaran non tunai dalam kegiatan ekonomi mereka atau belanja kebutuhan sehari-hari mereka.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Peraturan Bupati Malaka Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten Malaka dan pengaturan elektronifikasi Pemda dengan GNNT yang diinisiasi oleh BI bersama pemerintah pada tahun BI dalam rangka menciptakan *cashless society*. implementasi sistem pembayaran non tunai tidak hanya diterapkan di pemerintahan tetapi juga di masyarakat dalam bentuk bantuan sosial yang di transfer ke rekening penerima bantuan sosial. Hasil penelitian ini mempunyai relevansi dengan kebijakan implementasi transaksi non tunai dan menjelaskan bagaimana cara menetapkan transaksi non tunai

dan mengkaji kelayakan sistem pembayaran non tunai (Septiani dan Kusumastuti, 2019).

B. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Sistem Pembayaran Non Tunai di Kota Betun Kabupaten Malaka

a. Faktor Pendukung

1. Kerja Sama dengan pihak Bank

Kerja sama dengan pihak Bank merupakan salah satu faktor pendukung implementasi sistem pembayaran non tunai. Pihak bank sebagai pihak yang bisa memaparkan berbagai solusi dan layanan yang dapat memfasilitasi transaksi non tunai. Pihak Bank bisa memberikan lebih banyak informasi tentang kemudahan penggunaan transaksi non tunai, layanan perbankan digital, dan manfaat lainnya bagi masyarakat dan pemerintah setempat.

Hasil penelitian ini mempunyai relevansi dengan pengaturan elektronifikasi Pemda dengan GNNT yang diinisiasi oleh BI bersama pemerintah pada tahun BI dalam rangka menciptakan *cashless society*. Elektronifikasi transaksi Pemerintah daerah (Pemda) adalah suatu upaya yang terpadu dan terintegrasi untuk mengubah pembayaran dari tunai menjadi non tunai dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini pun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adam Al Kautsar (2021) membangun kerja sama antara bank dan pemerintah diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, efektif, efisien dan akuntabel untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak diinginkan dan juga (Mayasari F.A, 2020) bahwa kerja sama antara bank dan pemerintah dalam penerapan sistem transaksi non tunai merupakan bentuk keseriusan pemerintah mencapai transparansi pengelolaan keuangan daerah.

2. Sosialisasi dari pemerintah maupun bank kepada masyarakat

Sosialisasi pembayaran non tunai kepada masyarakat dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan mengenalkan digitalisasi transaksi kepada masyarakat. Dengan adanya sosialisasi tentang sistem pembayaran non tunai masyarakat bisa lebih mengetahui bagaimana cara penggunaannya dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu sosialisasi yang dilakukan yaitu sosialisasi mengenai pembayaran pajak online dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten

Malaka dan sosialisasi oleh *customer service* bank (CS) kepada nasabah mengenai produk-produk bank baik kartu maupun *mobile banking*.

Hasil penelitian ini mempunyai relevansi dengan tujuan sosialisasi menurut (Agustin, 2014) tujuan sosialisasi adalah untuk membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melanjutkan hidup di masyarakat nanti, untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara efektif, dan dengan kesadaran diri yang memadai dalam membantu, berurusan dengan fungsi organik.

Penelitian pun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniati (2021) yang menyatakan bahwa upaya yang bisa dilakukan dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan transaksi non tunai adalah mensosialisasikan manfaat yang diperoleh banyak pihak dan tidak hanya lembaga pemerintah terkait implementasi transaksi non tunai seperti sisi keamanan dimana transaksi non tunai mendorong orang tidak perlu bertransaksi lagi dengan uang tunai dalam jumlah yang banyak kemana-mana yang rawan akan resiko pencurian dan lainnya sebagainya.

b. Faktor Penghambat

1. Keterbatasan Masyarakat Dalam Menggunakan *Smartphone*

Keterbatasan masyarakat dalam menggunakan *smartphone* merupakan salah satu faktor utama dalam proses implementasi sistem pembayaran. Tidak semua masyarakat memiliki *smartphone* yang mumpuni untuk melakukan transaksi *online*. untuk pelaku usaha menengah ke bawah masih cukup banyak yang belum menerapkan pembayaran non tunai karena faktor konsumen masih menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran.

Hasil penelitian ini mempunyai relevansi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi menurut (Agostiono, 2010) keberhasilan proses implementasi suatu kebijakan tergantung pada sumber daya yang tersedia, khususnya sumber daya manusia sebagai pelaksana suatu kebijakan. Hal ini dapat dilihat hasil wawancara peneliti dengan masyarakat setempat, sedikit banyak dari masyarakat yang belum memiliki *smartphone* yang mumpuni dan belum memamah cara penggunaa aplikasi pembayaran digital.

Penelitian ini pun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Via Fahma Azka dan Talitha Azhari (2023) Kepemilikan *smartphone* yang belum merata menjadi tantangan dalam menentukan suatu keberhasilan implementasi

kebijakan dan juga sejalan dengan penelitian Era Prestoroika (2021) sumber daya manusia yang berkualitas dalam melaksanakan implementasi kebijakan adalah kunci keberhasilan dalam proses implementasi.

2. Jaringan internet yang tidak stabil

Jaringan internet yang tidak stabil dapat menyulitkan proses transaksi non tunai. Sehingga peran pemerintah maupun bank sangat dibutuhkan untuk mengusahakan penyediaan koneksi internet yang jauh lebih baik untuk keberhasilan pelaksanaan transaksi non tunai di Kota Betun Kabupaten Malaka.

Hasil penelitian ini mempunyai relevansi dengan konektivitas menurut (Muhammad Amar Ma'ruf, 2023) metode pembayaran non tunai bergantung pada koneksi internet. Transaksi non tunai akan berlangsung cepat jika koneksi internet bagus dan stabil. Namun, tak jarang metode pembayaran non tunai dapat terkendala jika terjadi gangguan jaringan atau terdapat koneksi internet yang tidak stabil

Penelitian ini pun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Haryono, 2020) berupa kendala yang menghambat pelaksanaan transaksi non tunai yaitu jaringan internet yang tidak stabil dan juga (Ulfi., Izzani, 2021) yang menyatakan belum meratanya penyediaan infrastruktur internet yang handal menjadi salah satu penghambat kebijakan transaksi non tunai yang dilaksanakan oleh pemerintah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan Dalam proses implementasi sistem pembayaran non tunai di Kota Betun Kabupaten Malaka belum sepenuhnya masyarakat menggunakan pembayaran nontunai, hal ini dikarenakan sebagian masyarakat yang masih belum mempunyai *smartphone* yang mumpuni, belum mengetahui bagaimana menggunakan aplikasi pembayaran non tunai dan belum terbiasa menggunakan sistem pembayaran tunai serta jaringan internet yang masih kurang stabil. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem pembayaran non tunai antara lain faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya yaitu kerja sama antara pihak bank dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai sistem

pembayaran non tunai dan faktor penghambatnya adalah keterbatasan masyarakat dalam menggunakan *smartphone* dan jaringan internet yang kurang stabil.

B. Saran

1. Pemerintah Betun Kabupaten Malaka untuk mengatasi jaringan yang tidak stabil dengan menambah *provider* jaringan atau internet satelit untuk daerah yang sulit dijangkau dan memberikan sosialisasi lebih kepada masyarakat mengenai program yang sudah berjalan seperti pembayaran pajak online melalui aplikasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat dari pembayaran non tunai.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya sehingga dapat melakukan penelitian lebih mendalam terkait implementasi sistem pembayaran non tunai dengan variabel dan objek penelitian yang baru.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, Muhammad Sofyan, (2015). Dampak Kebijakan E-money di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Adam Al Kautsar , Toddy Aditya, Dini Aulia Rizky.(2021). Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Langsung Di Dinas Sosial Kota Tangerang. JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN, 9(1), 2021, 115-124
- Agustin, Rinny. 2014. “Persepsi Masyarakat tentang Sosialisasi Bahaya Narkoba di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda”. Jurnal Ilmu Komunikasi.
- Agustino, 2010, Implementasi Kebijakan Public Model Van Meter dan Van Harn. Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati, 1991, Ilmu Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library* UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Era Prestoroika, Agus Eko Tejo Sasongko, Debbie Yuari Siallagan. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. JIAP Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Vol. 9, No. 2, September, 2021
- Harahap, N. (2018). Pengaruh Transaksi Non Tunai menggunakan Layanan Virtual Bisnis terhadap Kepuasan Konsumen pada PT. Indomarco Prismatama Cabang Medan. Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 1(1)
- Haryono, H. (2020). Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah

- Daerah Kabupaten Landak. JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura), 9(2).
- Mayasari, F. A. (2020). Pengaruh Islamicity Performance Index Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2014-2018. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, XVIII(1), 22–38.
- Muhammad Amar Ma'ruf.(2023). Dilema Bendahara: Tunai VS Non Tunai, Mana Lebih Menguntungkan?. Diakses dalam :
<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/surabaya1/id/data-publikasi/artikel/2977-dilema-bendahara-tunai-vs-non-tunai,-mana-lebih-menguntungkan.html>
- Peraturan Bupati Malaka Nomor 28 Tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Pembayaran Non Tunai Pada Pemerintahan Kabupaten Malaka.
- Pramono, B. Dkk. 2006 “Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap. Perekonomian Dan Kebijakan Moneter”. Jakarta: Bank Indonesia.
- Septiani, Selly. dan Endah Kusumastuti. 2019. Penerapan Transaksi Non-Tunai. Dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip *Good Governance* (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat). *Prosiding Industrial Reseach Workshop And National Seminar* 10(1) : 1171-1181
- Sihaloho, A. R. (2020). Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan Umkm Di Medan. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(2).
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Alfabeta
- Ulfi, Izzani. (2020). Tantangan Dan Peluang Kebijakan Non-Tunai: Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*. Vol. 25 No. 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- VF Azka, T Azhari, A Sufarhan, A Ansori. (2023). Efektivitas Pembayaran Digital: Keunggulan, Tantangan, dan Solusi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* Vol.02 No. 02 Oktober - Desember 2024
- Wicaksono, t. (2020). Metode penelitian. *Journal of cemical information and modeling*, 53(9),1689-1699.
- Yati Kurniati, , & . (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG (Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung): *Array. Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 293–310.